

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN KARAKTER PELAJAR PANCASILA

Mima Defliyanti Saragih, Joy Novi Yanti Lumbantobing, Manotar Leryaldo Sinaga,
Chandra Fhutu Neva

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

mimasaragih38@gmail.com, joylumbantobing44@gmail.com,
manotarmanotar3@gmail.com, chandraneva@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study was motivated by the need to strengthen the character of Pancasila students amid global challenges and the rapid pace of digitalization that affects the moral values of the younger generation. Civic Education (PKn) has a strategic role in instilling national, moral, and humanitarian values rooted in Pancasila as the foundation of the state. The purpose of this study is to analyze the essence of Civic Education as the foundation for shaping the character of Pancasila students who are faithful, noble, independent, critical thinkers, cooperative, and globally diverse. The method used is library research by examining various scientific sources such as books, journals, and national education policy documents. The results of the study show that the internalization of Pancasila values in Civic Education learning requires the integration of cognitive, affective, and psychomotor dimensions supported by the roles of teachers, the school environment, and the family. In addition, project-based and contextual learning models have proven to be effective in transforming values into the actual behavior of students. In conclusion, Civic Education plays a major role as the foundation in shaping Pancasila students who not only understand national values theoretically, but are also able to implement them in their daily lives as a manifestation of the civilized and integrity-based character of the Indonesian nation.

Keywords: Civic Education, Pancasila Values, Character Building, Pancasila Students, Character Education, Digital Era

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di tengah tantangan global dan derasnya arus digitalisasi yang memengaruhi nilai moral generasi muda. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moral, dan kemanusiaan yang berakar pada Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hakikat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai landasan pembentukan karakter pelajar Pancasila yang beriman,

berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn memerlukan integrasi dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang didukung oleh peran guru, lingkungan sekolah, dan keluarga. Selain itu, model pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual terbukti efektif dalam mengubah nilai menjadi perilaku nyata peserta didik. Kesimpulannya, Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk pelajar Pancasila yang tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud karakter bangsa Indonesia yang beradab dan berintegritas.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Nilai Pancasila, Pembentukan Karakter, Pelajar Pancasila, Pendidikan Karakter, Era Digital

A. Pendahuluan

Pendidikan berfungsi sebagai sarana utama dalam menanamkan nilai dan membentuk sikap warga negara. Perubahan sosial yang cepat serta tantangan global menuntut hadirnya sistem pendidikan yang mampu menumbuhkan karakter kuat pada peserta didik. Di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Mata pelajaran ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga pada proses penanaman nilai-nilai kebangsaan dan moral. Keberhasilan sistem pendidikan dapat dilihat dari sejauh mana karakter peserta didik dapat terbentuk secara utuh. Karakter tersebut tentunya harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan

utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, kajian mengenai hakikat PKn menjadi sangat penting untuk dilakukan pada masa kini. (Leilani Alysia Hapsari, 2023)

Pancasila bukan sekadar lambang kenegaraan, melainkan menjadi dasar nilai serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti semangat gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan, perlu dihayati dan diterapkan dalam keseharian. Sekolah berperan sebagai wadah formal yang memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk karakter kebangsaan

yang kuat. Hasil pembentukan karakter siswa sangat dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai kebangsaan dan penerapan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, penyesuaian nilai-nilai Pancasila dengan konteks lokal menjadi hal penting dalam proses pendidikan. Di tengah keberagaman masyarakat, kemampuan untuk menghormati perbedaan merupakan cerminan karakter berlandaskan Pancasila. Maka dari itu, dibutuhkan upaya yang terencana dan berkelanjutan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dihayati dalam tindakan nyata (Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, 2023)

Perkembangan zaman modern yang ditandai dengan digitalisasi dan derasnya arus informasi membawa pengaruh besar terhadap pembentukan karakter generasi muda. Paparan terhadap media sosial kerap mempercepat proses percampuran nilai-nilai budaya yang tidak selalu berdampak positif. Di sisi lain, globalisasi menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan berpikir kritis serta memahami etika dalam bermedia digital. Dunia pendidikan, khususnya sekolah, ditantang untuk mampu

menyeimbangkan antara penguasaan literasi digital dan penanaman nilai-nilai moral kepada peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai wadah pembelajaran nilai dan karakter dalam menghadapi tantangan era digital. Namun, pelaksanaannya sering kali belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga efektivitasnya menurun. Inkonsistensi antara kurikulum dan praktik di lapangan juga menjadi kendala dalam proses internalisasi nilai kepada siswa. (Yayang Furi Furnamasari, 2024).

Kebijakan pendidikan nasional menekankan urgensi pembentukan pelajar yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dokumen kebijakan tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan kurikulum dan penetapan standar kompetensi lulusan di setiap jenjang pendidikan. Namun, penerapannya di lapangan masih menunjukkan variasi antar sekolah dan wilayah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh peran guru, ketersediaan sumber belajar, serta dukungan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, sinergi antara pihak

sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam memperkuat pendidikan karakter. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan partisipasi sosial turut berperan penting dalam membentuk kepribadian peserta didik. Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan sebaiknya menitikberatkan pada dampak nyata berupa perubahan sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari (Maulidah Rizkiyah, 2024)

Oleh karena itu, penelitian ini mencari tahu apakah hakikat Pendidikan Kewarganegaraan benar-benar dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk karakter pelajar Pancasila yang beriman, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Melalui pemahaman terhadap nilai, tujuan, serta implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam perilaku nyata peserta didik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan karakter pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berakar pada

nilai-nilai kebangsaan dan moral Pancasila.

B. Metode Penelitian (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang bersumber dari buku, jurnal, serta referensi lainnya yang membahas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai landasan pembentukan karakter bangsa. Menurut Muhadjir (2000), studi pustaka mencakup beberapa hal, yaitu: pertama, telaah teoritis terhadap suatu disiplin ilmu yang selanjutnya dapat dikaji secara empiris untuk memperoleh kebenaran; kedua, studi yang berupaya memahami objek penelitian secara filosofis atau teoritik yang berkaitan dengan validitas; ketiga, kajian terhadap teori-teori linguistik; dan keempat, studi terhadap karya sastra.

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk memahami dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, yang tidak hanya memuat aspek-aspek keilmuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga berperan sebagai pendidikan karakter. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk warga negara yang memiliki karakter kuat, selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bagian krusial dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam kerangka negara demokrasi seperti Indonesia, PKn berperan sebagai media strategis dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, memperkuat pembentukan karakter, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendekatan yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, pembelajaran PKn tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, melainkan juga membentuk pribadi warga negara yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa (WULANDARI 2022).

Hakikat dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat nilai-nilai Pancasila serta unsur-unsur yang dapat membangun dan menumbuhkan semangat serta jiwa Pancasila, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, kepada generasi muda. Pendidikan ini secara formal menjadi

dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fitriani dkk. 2023). Pada hakekatnya Pendidikan mengandung tiga (3) unsur utama yaitu:

1. **Mendidik**, yaitu membentuk kepribadian peserta didik agar mampu memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menampilkannya dalam sikap dan perilaku pribadi;
2. **Mengajar**, yakni memberikan pengetahuan kepada peserta didik agar dapat memahami isi dan makna dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konseptual;
3. **Melatih**, yaitu menanamkan keterampilan praktis kepada peserta didik agar mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan utama untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan, meningkatkan kesadaran terhadap hukum dan dinamika politik,

serta mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, sikap saling menghormati dalam keberagaman, serta komitmen terhadap prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, pembelajaran PKn tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan sosial dalam diri peserta didik.

Berdasarkan Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang diarahkan pada pembentukan peserta didik agar menjadi warga negara yang memahami serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Parawangsa, Dewi, and Furnamasari 2021). Sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas, " adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mampu berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

2. Aktif terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan penuh tanggung jawab dan kecerdasan, serta menjunjung tinggi sikap antikorupsi.
3. Tumbuh dan berkembang secara positif dalam semangat demokrasi, membentuk jati diri yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan bangsa lain.
4. Menjalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila pada tingkat peserta didik bukan sekadar penguasaan kognitif (hafalan sila dan teks konstitusi), melainkan proses pembudayaan yang berujung pada perubahan disposisi dan tindakan sehari-hari. Proses ini melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan konatif artinya siswa harus memahami makna nilai, menghayatinya secara emosional, dan akhirnya mengekspresikannya melalui perilaku yang konsisten (misalnya toleransi, gotong royong, kejujuran). Penelitian menunjukkan bahwa tanpa

interaksi sistematis antara kurikulum, model pengajaran, dan praktik sekolah (keteladanan guru, kebijakan sekolah, aktivitas ko-kurikuler), internalisasi cenderung berhenti pada level pengetahuan saja dan tidak terwujud menjadi perilaku nyata.

Sejauh mana nilai Pancasila diwujudkan dalam perilaku peserta didik sangat dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan. Pendekatan proyek berbasis penguatan profil pelajar Pancasila (Project Based Learning yang dikaitkan langsung dengan konteks sosial sekolah dan komunitas) terbukti lebih efektif mendorong siswa mengaplikasikan nilai misalnya melalui proyek layanan masyarakat yang melatih gotong royong dan keadilan sosial ketimbang metode ceramah yang hanya men-transfer informasi. Oleh karena itu, transformasi nilai menjadi tindakan nyata memerlukan tugas autentik dan pengalaman nyata yang memungkinkan siswa mempraktikkan nilai dalam konteks riil (Rofiqi, 2023).

Peran guru dan iklim sekolah tak dapat diremehkan: guru sebagai teladan, fasilitator refleksi moral, dan pengelola lingkungan belajar memegang peran sentral dalam memediasi internalisasi ke dalam tindakan. Ketika guru konsisten menegakkan aturan, memberi umpan

balik etis, dan menunjukkan perilaku pancasilais dalam interaksi sehari-hari, peluang bahwa peserta didik meniru dan menginternalisasi nilai meningkat signifikan. Namun penelitian lapangan mengindikasikan adanya gap antara kebijakan ideal dan praktik di lapangan misalnya ketidakkonsistenan penerapan nilai atau minimnya penguatan perilaku positif sehingga perilaku yang diharapkan (toleransi, disiplin, anti-bullying) kurang tampak secara konsisten pada siswa.

Menurut (Siregar & Naelofaria, 2020) kondisi eksternal termasuk pengaruh media sosial, narasi radikalisme, maupun budaya instan juga menentukan seberapa kuat internalisasi itu bertahan menjadi perilaku nyata. Di era digital, kemampuan kritis peserta didik untuk memilah informasi, serta pendidikan literasi digital yang tergabung dalam pembelajaran kewarganegaraan, menjadi aspek penting agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan tetapi juga filter moral dalam bersikap dan bertindak. Tanpa penguatan literasi dan keterampilan berpikir kritis, internalisasi di ranah sekolah mudah terkikis oleh praktik sosial di luar sekolah yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Evaluasi keberhasilan internalisasi harus mengukur indikator perilaku konkret misalnya frekuensi tindakan

tolong-menolong, laporan kasus bullying, kepatuhan terhadap norma bersama, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan bukan semata skor tes kognitif. Studi-studi terakhir merekomendasikan kombinasi observasi perilaku, refleksi siswa (journaling), dan penilaian portofolio proyek sebagai alat ukur yang lebih valid untuk melihat apakah nilai telah melebur ke dalam tindakan nyata (Purba et al., 2024). Dengan menggunakan instrumen evaluasi yang berorientasi perilaku, sekolah dapat memetakan area yang berhasil dan yang perlu penguatan sehingga intervensi menjadi lebih terfokus dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan empiris dan gagasan teoretis tersebut, upaya meningkatkan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku peserta didik memerlukan strategi terpadu: (1) integrasi pembelajaran proyek dan kegiatan kontekstual yang menuntut praktek nilai, (2) pelatihan dan penguatan peran guru sebagai teladan dan fasilitator, (3) penguatan literasi digital dan pendidikan nilai untuk menghadapi pengaruh eksternal, serta (4) sistem monitoring-evaluasi berbasis indikator perilaku. Kombinasi elemen tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa internalisasi tidak berhenti sebagai konsep akademik, tetapi bertransformasi menjadi karakter dan

kebiasaan perilaku yang nyata dan terukur pada peserta didik.

E. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di tengah tantangan global dan pesatnya perkembangan zaman, PKn tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menanamkan sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang mencerminkan jati diri bangsa. Melalui pendekatan yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, pembelajaran PKn mendorong pelajar untuk menjadi individu yang kritis, bertanggung jawab, toleran, dan berjiwa nasionalis. Dengan demikian, hakikat Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang siap menghadapi perubahan global tanpa kehilangan identitas kebangsaannya.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui dimensi kognitif, peserta didik dibekali dengan pemahaman

mendalam tentang sistem kenegaraan, hak asasi manusia, demokrasi, dan konstitusi. Ranah afektif membentuk sikap cinta tanah air, tanggung jawab sosial, serta toleransi terhadap keberagaman. Sementara itu, ranah psikomotorik mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata, seperti partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, serta semangat gotong royong.

Pembentukan karakter pelajar Pancasila sangat erat kaitannya dengan implementasi pembelajaran PKN di sekolah. Pelajar Pancasila adalah sosok yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan mampu hidup dalam keberagaman global. Karakter-karakter ini tidak dapat dibentuk hanya melalui pendekatan teoritis, melainkan memerlukan proses pendidikan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Aulia, Miftahul Jannah Harahap, Yasmina Fajri, Islam Negeri, and Sumatera Utara. 2023. "Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan." *Pendidikan dan Riset* 1(1): 29–40.
- Parawangsa, Endah, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. 2021. "Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar (SD)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(3): 8050–54.
- WULANDARI, DWI INDAH. 2022. "Peningkatan Perekonomian Di Indonesia Melalui Pasar Bebas." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2(1): 96–112. doi:10.38156/jisp.v2i1.123.
- Leilani Alysia Hapsari, S. K. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter dan Kesadaran Bela Negara pada Generasi Muda untuk Pembangunan Bangsa. *Indigenous Knowledge*, 269-276.
- Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, F. P. (2023). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1983-1988.
- Maulidah Rizkiyah, S. F. (2024). Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 377-393.

- Rinita Rosalinda Dewi, E. S. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Di Persekolahan. *Journal of Social Science and Education*, 71-84.
- Yayang Furi Furnamasari, A. A. (2024). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa: Suatu Upaya Membangun Etika Dan Moral . *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 2194-2204.
- Purba, D. T., Lilyana Simarmata, G., Gultom, I. A., Giawa, S. J., & Angel, S. M. (2024). Rendahnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 107–114.
<https://doi.org/10.59581/jipsoshu m-widyakarya.v2i3.3414>
- Rofiqi, A. (2023). *Penguatan pendidikan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila menuju era society 5.0*. 14, 166–176.
<https://journal.uny.ac.id/index.php /jpka/>
- Siregar, I., & Naelofaria, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Tingkat Sekolah Dasar (Sd) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 130–135.
<https://doi.org/10.29303/juridiksia m.v7i2.135>